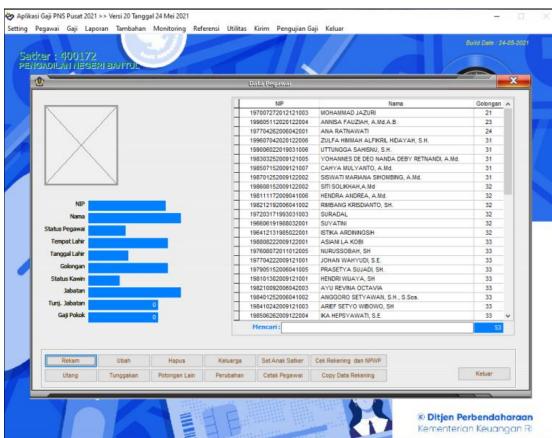
APLIKASI PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL

APLIKASI BAGIAN ADMINISTRASI

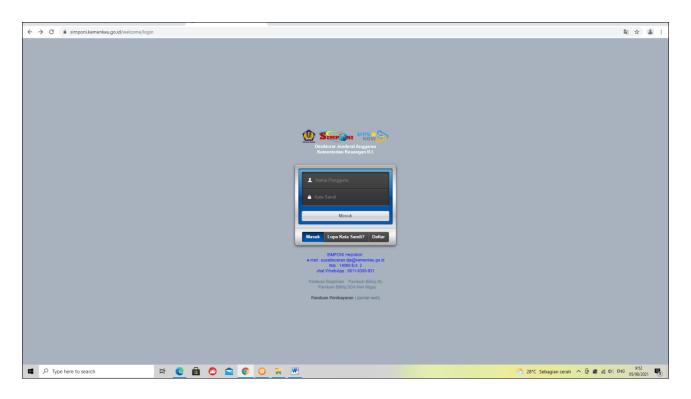
A. Aplikasi GPP 2021

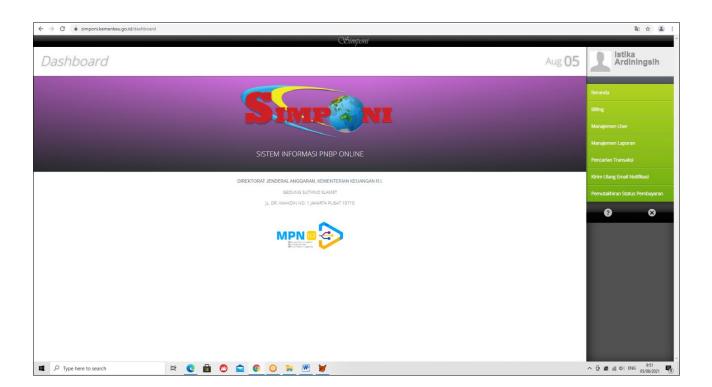




Aplikasi GPP digunakan untuk mempermudah mengelola gaji Pegawai Negeri Sipil pusat pada Satuan Kerja.

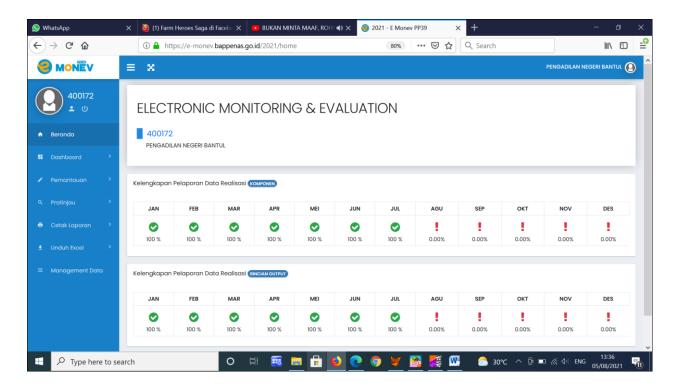
B. Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara (K2PN)

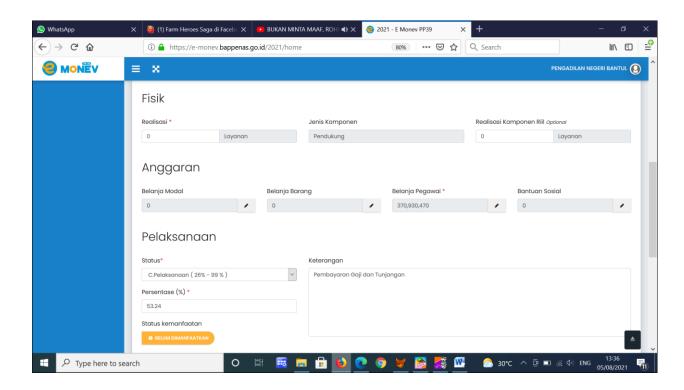




Aplikasi Konfirmasi Penerimaan dilakukan oleh satuan kerja maupun individu (petugas) dalam rangka melakukan pengecekan atas setoran yang dilakukan apakah sudah masuk ke kas negara atau belum.

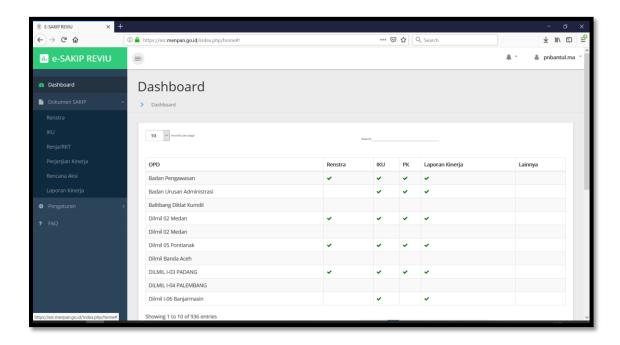
C. Aplikasi e-Monev Bappenas





Merupakan aplikasi sebagai upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev kinerja pembangunan.

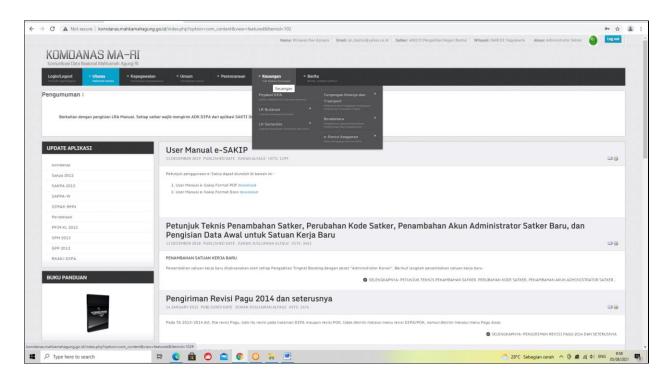
D. Aplikasi e-SAKIP



E-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.

E. Aplikasi Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) Bagian Keuangan



Merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi utama sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, keuangan, dan remunerasi pencatatan transaksi.

F. Aplikasi RKAKL (Akuntansi Persediaan)

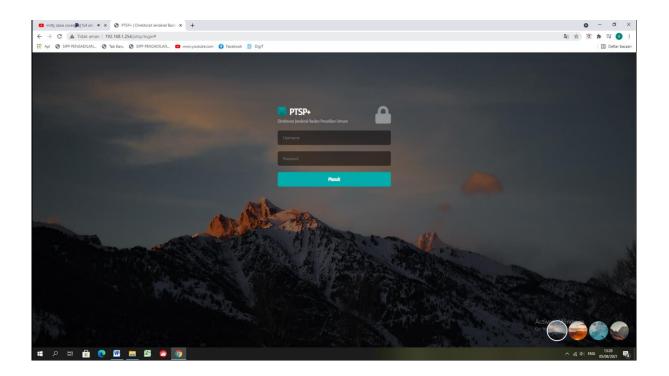


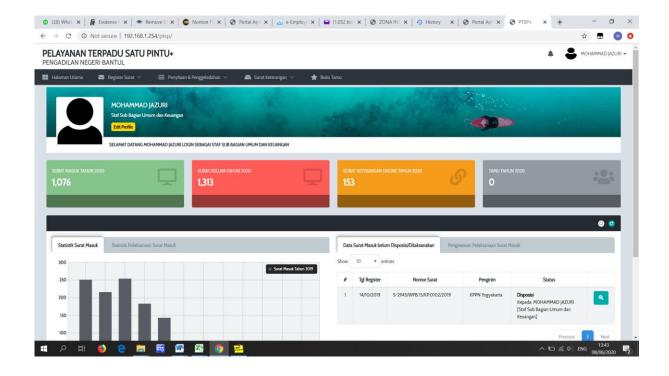


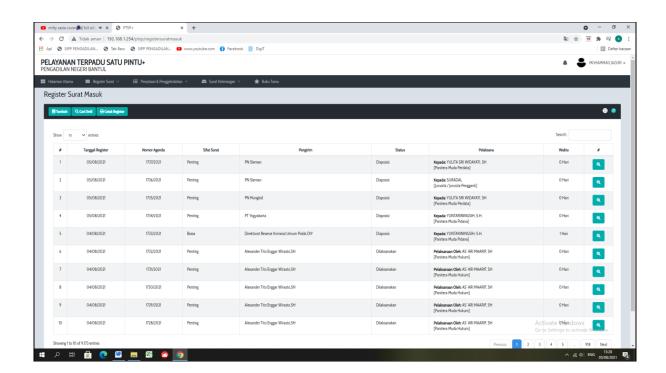


Aplikasi Persediaan adalah Sistem aplikasi yang diperuntukan bagi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tujuan memberikan kemudahan pengelolaan Stok barang persediaan untuk keperluan operasional kantor. Aplikasi ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

G. Aplikasi PTSP + (Khusus Persuratan)

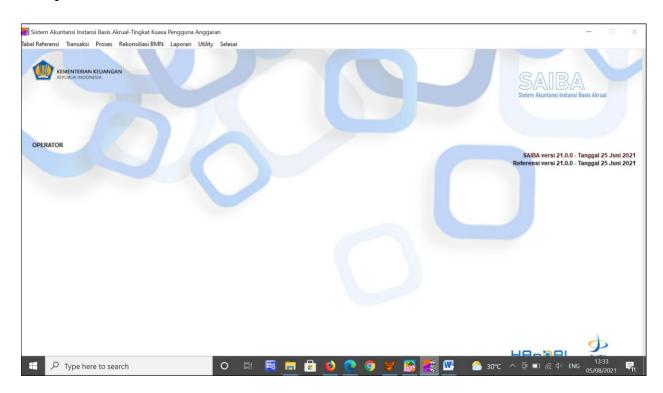


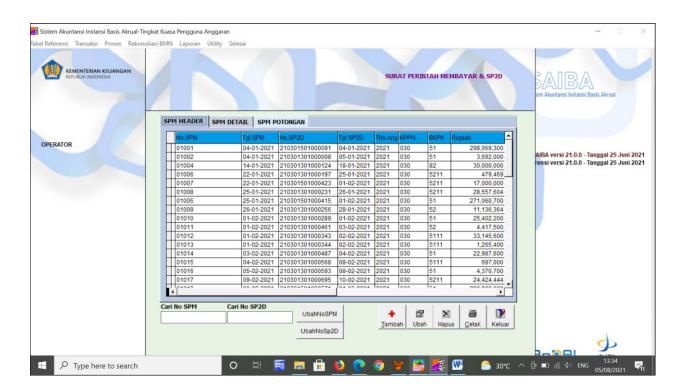




Adalah aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar.

H. Aplikasi SAIBA

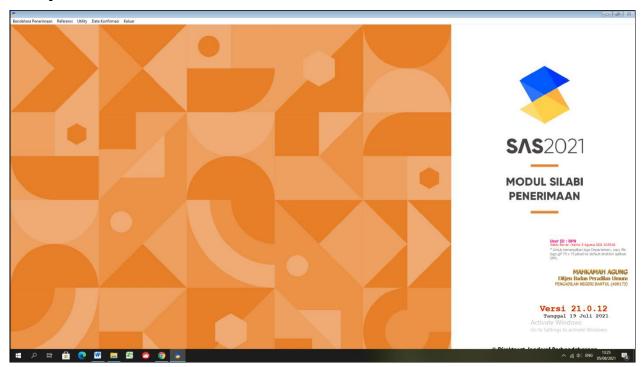


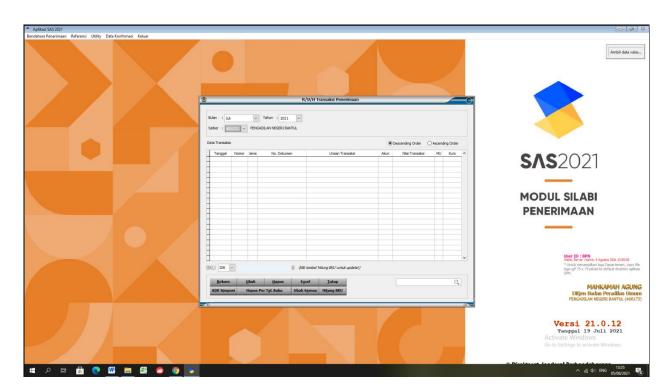


Aplikasi yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan instansi adalah aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pelaporan laporan keuangan yang menunjukkan berapa besarnya penyerapan anggaran yang digunakan beserta penjelasannya.

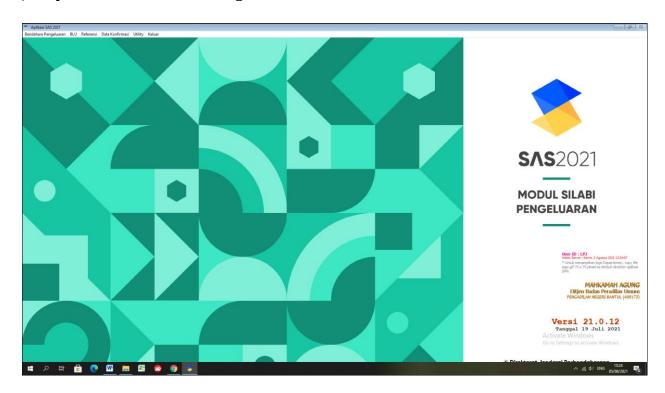
I. Aplikasi SAS Bendahara Penerimaan 2021

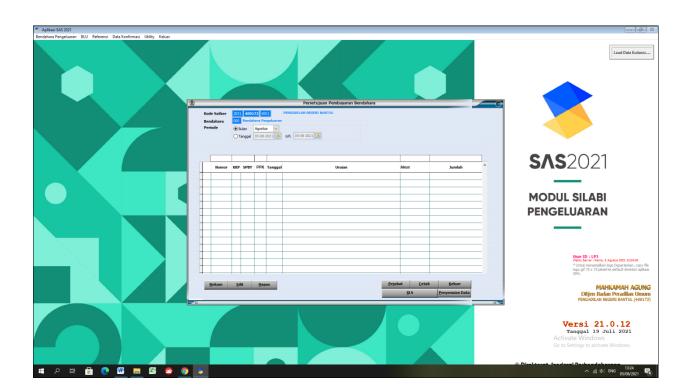




Aplikasi pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan bendahara satuan kerja.

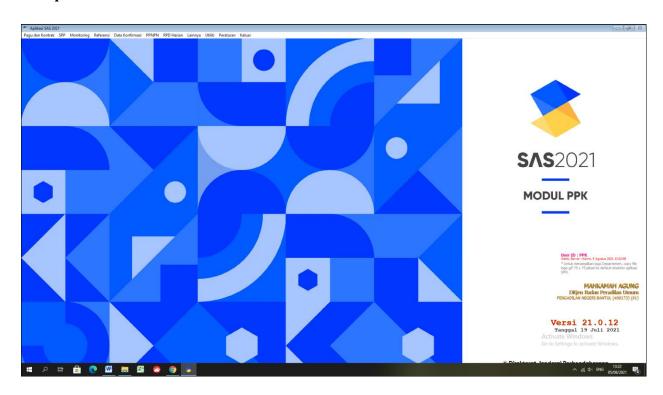
J. Aplikasi SAS Bendahara Pengeluaran 2021

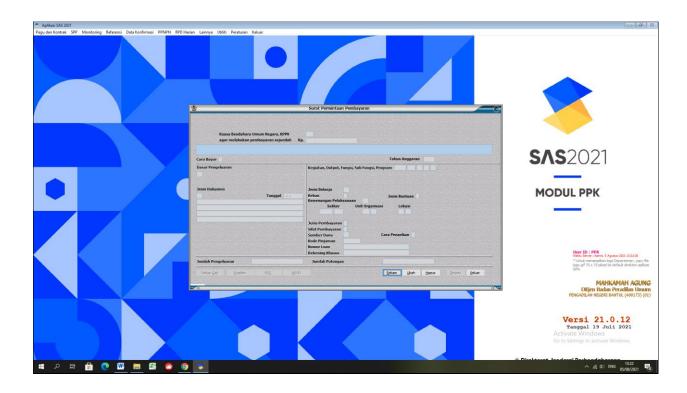




Aplikasi pembukuan dan pertanggungjawaban pengeluaran bendahara satuan kerja.

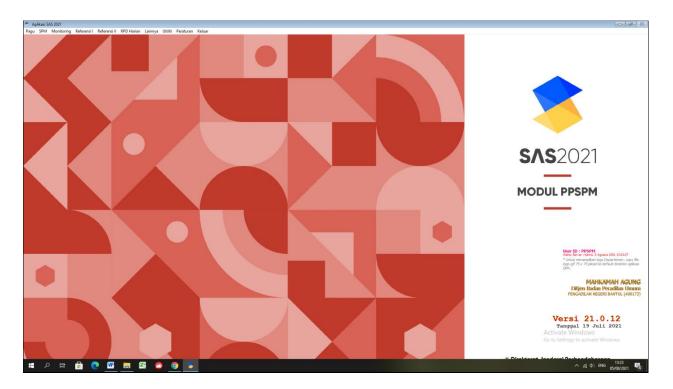
K. Aplikasi SAS PPK 2021

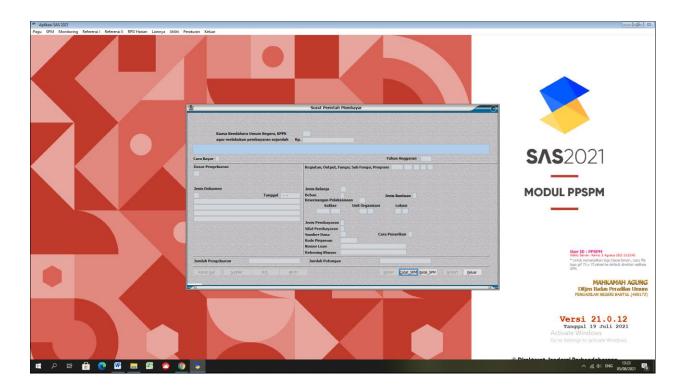




Merupakan aplikasi yang mencatat pembebanan pada DIPA dan pengajuan surat permintaan pembayaran.

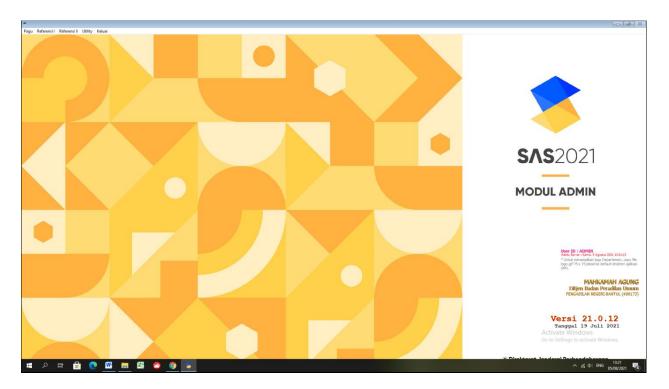
L. Aplikasi SAS PPSPM 2021

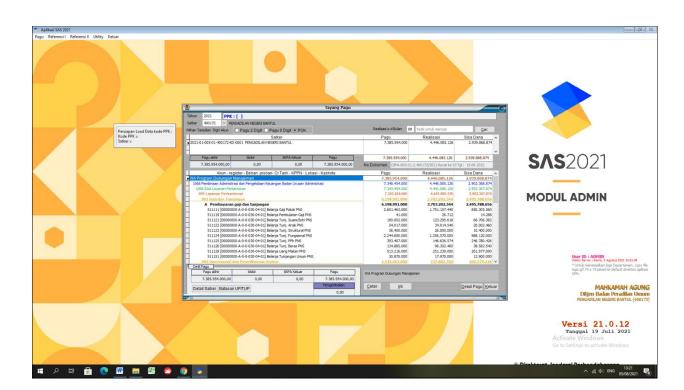




Merupakan aplikasi untuk pengajuan surat perintah pembayaran pada bendahara umum Negara (KPPN)

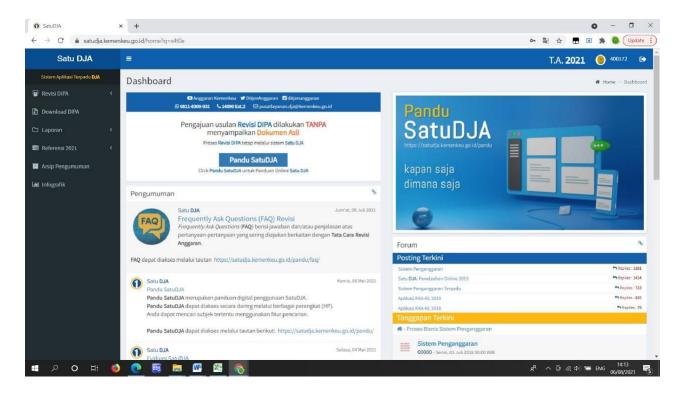
M. Aplikasi SAS 2021

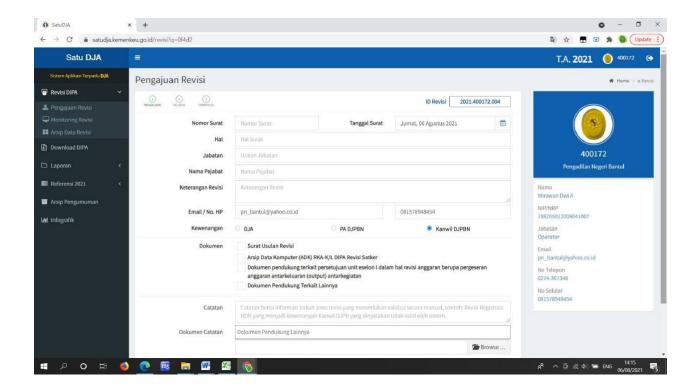




Aplikasi terkait pembebanan pada DIPA dan pengajuan pembayaran.

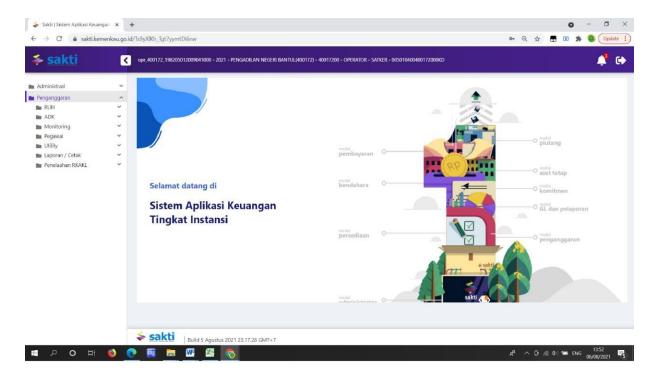
N. Aplikasi SATUDJA

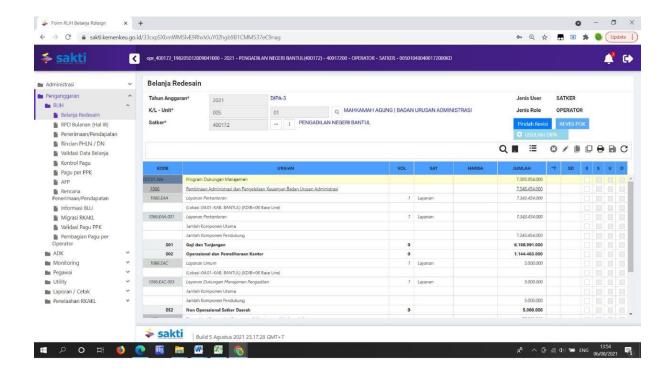




Aplikasi yang dikembangkan oleh kementerian keuangan berbasis jaringan (online) untuk melakukan revisi anggaran.

O. Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)



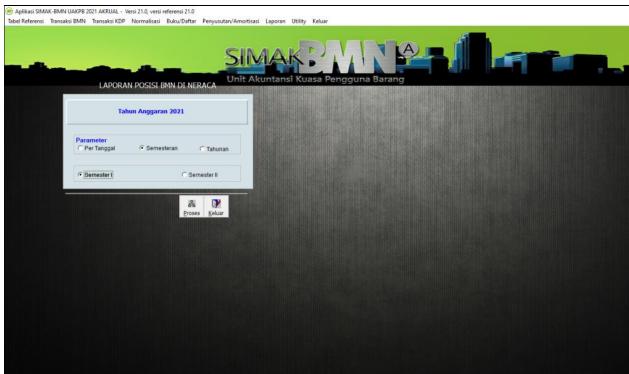


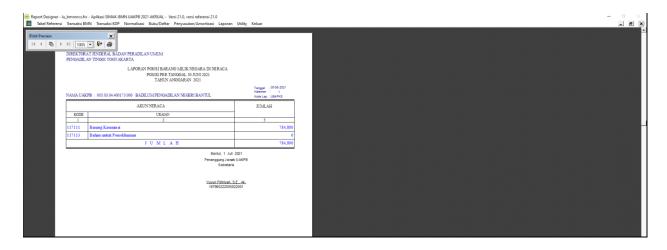
Aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada.

P. Aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara)



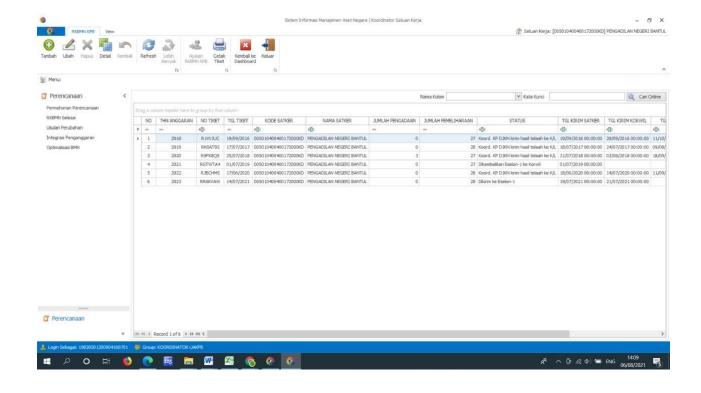




Aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk – keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.

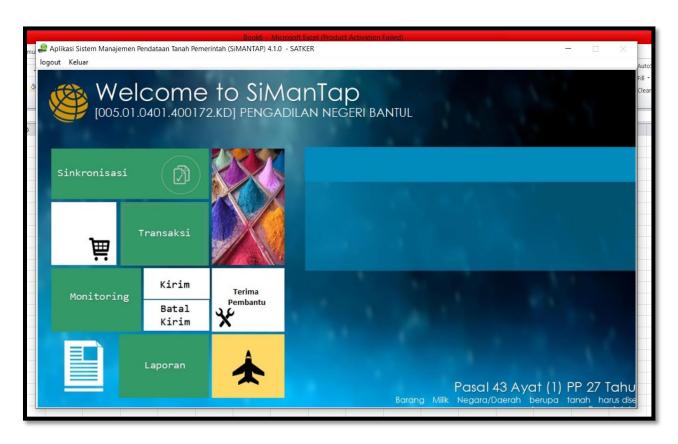
Q. Aplikasi SIMAN PERENCANAAN

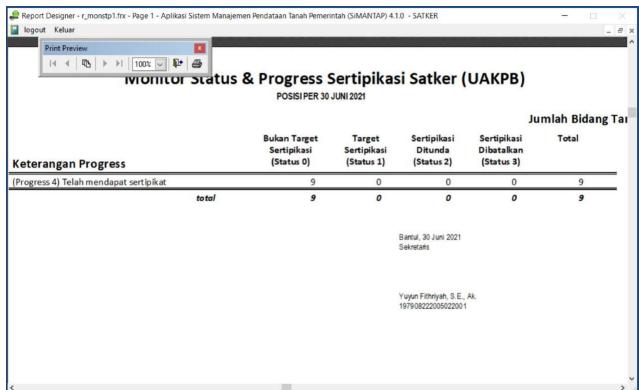




Merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna.

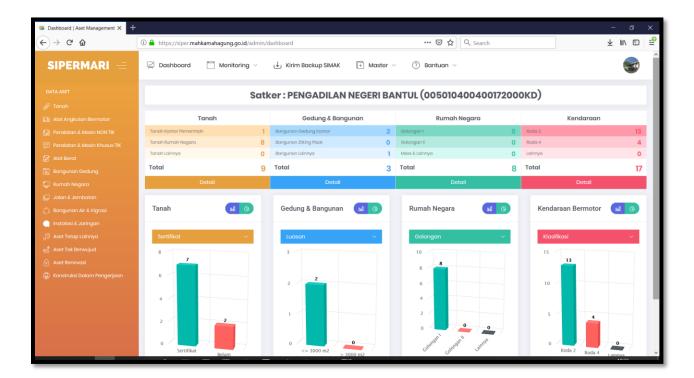
R. Aplikasi Sistem Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP)





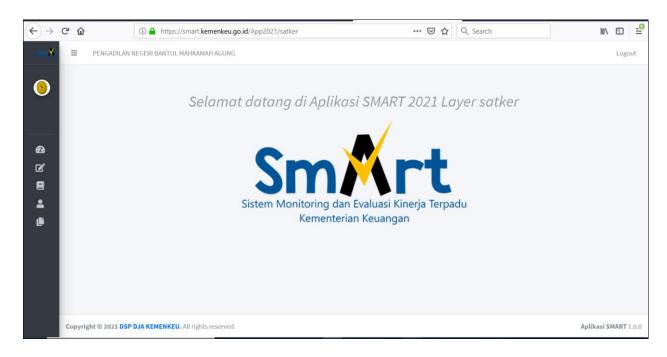
Aplikasi yang khusus mencatat data tanah milik Negara, aplikasi ini bertujuan untuk melakukan monitoring terhadap data tanah milik Negara yang dikuasai oleh masing-masing satker secara lebih terperinci.

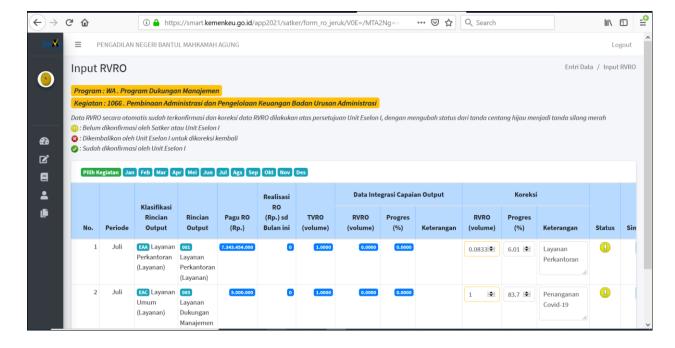
S. Aplikasi SIPERMARI



SIPERMARI merupakan sistem informasi berbasis jaringan (web) yang digunakan untuk membantu kegiatan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara modern dan akuntabel. SIPERMARI dapat dijalankan dengan bantuan dari Ditjen Kekayaan Negara dan Pusintek Kementerian Keuangan dengan melakukan sinkronisasi data dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dengan konsep Single Data Entry atau hanya menginput satu kali saja, yaitu pada aplikasi SIMAK-BMN, yang terintegrasi ke dalam aplikasi SIMAN setelah melalui proses rekonsiliasi.

T. Aplikasi SMART

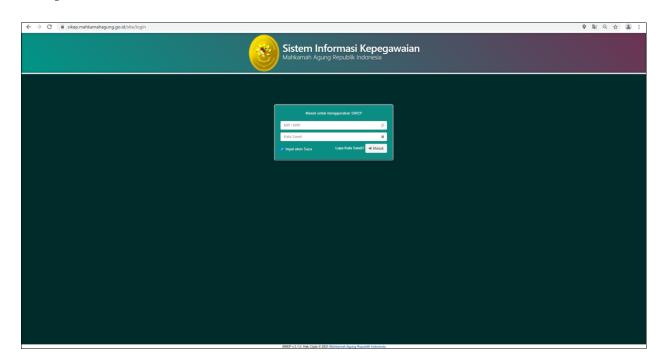


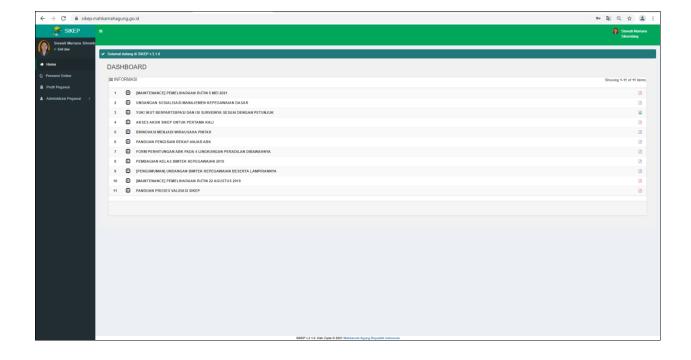


Aplikasi yang digunakan sebagai pengukuran kinerja anggaran satuan kerja

Aplikasi Sistem Monitoring Aktivitas Rutin (SMARt) merupakan aplikasi yang dikembangkan DJKN yang mengusung perubahan proses bisnis dan kegiatan rutin di lingkungan kerja DJKN menuju era digitalisasi, *less-paper*, dan otomatis.

U. Aplikasi SIKEP



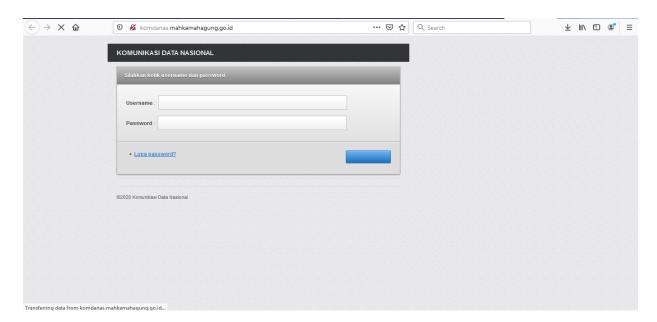


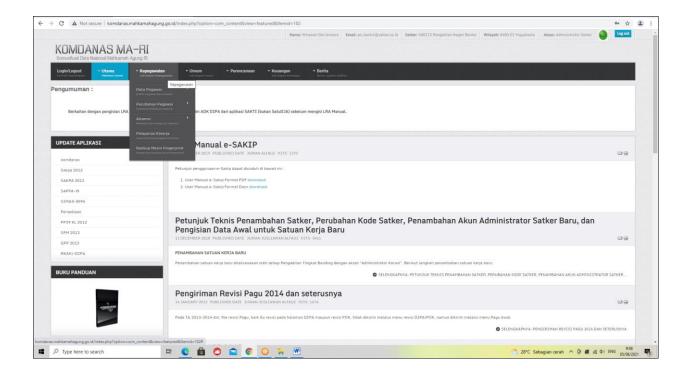
Sikep adalah Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian yang menyajikan pengelolaan data dan dokumen kepegawaian bagi seluruh Sumber Daya Manusia pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

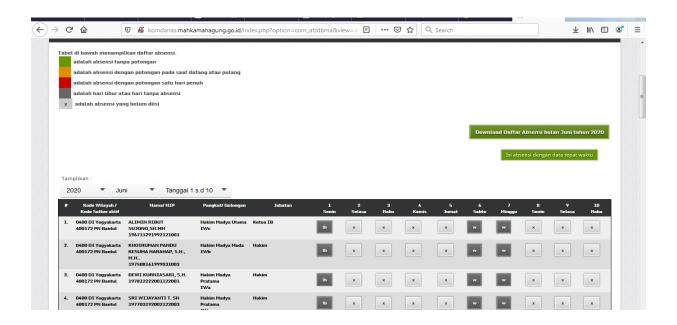
Sikep berisi data Seluruh Aparatur Mahkamah Agung RI, data pokok, Riwayat Pekerjaan, Pendidikan Formal/ Informal, Riwayat Diklat, Penilaian dan lain – lain.

Fungsi lain dari SIKEP pada masa Pandemi Covid ini adalah Presensi Online berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020.

V. Aplikasi KOMDANAS (Kepegawaian)







Komunikasi Data Nasional pada Kepegawaian berisi daftar hadir Seluruh Pegawai Dalam satu Satuan Kerja. Yang selanjutnya dijadikan dasar pengajuan untuk remunerasi bagi pegawai dan biaya transportasi bagi Hakim.